

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu jenis bisnis yang saat ini berkembang di Indonesia adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM (Nuvitasari, 2019). UMKM merupakan salah satu jenis usaha kecil yang sangat berperan dalam peningkatan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Karena keberadaan UMKM mampu bertahan dalam situasi apapun untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat (Srijani dan kadeni, 2020). UMKM memiliki peranan sebagai sektor ekonomi rakyat yang berkaitan langsung dengan masyarakat pada umumnya, dengan adanya UMKM diharapkan dapat mendorong perkembangan disektor lainnya. Jumlah UMKM meningkat dapat membuka peluang kerja yang lebih luas sehingga akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan pendapatan akan mendorong daya beli masyarakat sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah (Anugerah dan Nuraini, 2021).

Pertumbuhan UMKM saat ini tersebar di berbagai provinsi di Indonesia khususnya pada provinsi Jawa Timur dimana aktivitas ekonomi yang dominan adalah Usaha Mikro Kecil (UMK) dengan proporsi 98,95 (BPS Jatim, 2018). Menurut Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian di daerah. Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur mencapai 57,25%. Jumlah ini sangat signifikan dalam menopang pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur

(Susyanti dan pardiman, 2022). Berikut kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur :

Tabel 1.1 Kontribusi UMKM Terhadap Jawa Timur

Tahun	Presentase
2016	56,43
2017	56,63
2018	56,93
2019	57,26
2020	57,25
2021	57,81

Sumber : *Dinas Koperasi dan UMK provinsi Jawa Timur data diolah tahun 2023*

Berdasarkan tabel 1.1 kontribusi UMKM terhadap Jawa Timur pertahunnya dari 2016 – 2021 mengalami peningkatan. Kontribusi UMKM tertinggi terjadi di tahun 2021, mengingat Pandemi Covid-19 yang mewabah sejak awal tahun 2020 dengan adanya kebijakan PSBB membuat jumlah penjualan pelaku UMKM mengalami penurunan pendapatan, maka dalam rangka memulihkan dan menata kembali kondisi ekonomi diperlukan strategi dan jalan keluar yang tepat mengingat telah banyaknya kerugian yang dialami para pelaku usaha juga semakin ketatnya persaingan antar pengusaha sehingga perlu terus melakukan pembaharuan dan evaluasi mengenai siklus usaha dengan tetap mengikuti keadaan yang tengah berkembang agar usaha tetap bisa bertahan, Terdapat beberapa skema perlindungan UMKM yang dilakukan pemerintah yaitu (a) pemberian bantuan social kepada pelaku UMKM miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM, (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM, (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM, (d) menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah

sebagai penyangga produk UMKM, dan (e) pelatihan secara e-learning (Anggraeni dkk, 2021).

Hal ini dapat diartikan bahwa Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, keadaan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat (Yasa dan Arka, 2015). Berdasarkan data Perdakum Jatim jumlah UMKM di Jawa Timur menurut Lapangan usaha dan Kabupaten/Kota yang termasuk se karesidenan madiun yang beranggotakan yaitu Madiun, Kota Madiun, Ponorogo, Magetan, Ngawi dan Pacitan. Ponorogo merupakan Kabupaten yang mempunyai jumlah UMKM paling banyak se Karesidenan Madiun. Dimana Kabupaten Ponorogo mempunyai 283.967 UMKM, Daerah Ngawi berada di urutan kedua 253.870 UMKM, Daerah Pacitan diposisi ketiga 212.197 UMKM, Daerah Madiun 191.880 UMKM, Daerah Magetan 181.760 UMKM dan Kota Madiun 36.555 UMKM (diskopukm.jatimprov.go.id diakses 25 November 2022).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 31.328 UMKM, meningkat menjadi 35.025 di tahun 2020, dan mengalami peningkatan kembali di tahun 2021 sebesar 38.387 UMKM yang didominasi oleh tiga sektor usaha yaitu sektor dagang 63,03 persen, sektor produksi 19,07 persen, dan sektor jasa 17,90 persen, dengan total UMKM sejumlah 38.387 unit . Hal ini dapat disimpulkan bahwa sektor UMKM di Kabupaten Ponorogo yang paling dominan yaitu dagang (Perdakum,2021). Dimana perkembangan tersebut

tersebar di sejumlah wilayah Kabupaten Ponorogo yang meliputi 21 kecamatan dan hampir semua UMKM yang berada di bawah naungan Dinas Perdagangan koperasi dan Usaha, Kecil, Menengah (UMK) Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Tabel 1.2 Data Jumlah UMKM Kecamatan di Ponorogo 2021

No	Kecamatan	Jenis Usaha			Jumlah
		Dagang	Produksi	Jasa	
1	Ngrayun	545	391	122	1.058
2	Slahung	1.142	487	562	2.191
3	Bungkal	349	303	140	792
4	Sambit	1.051	675	257	1.983
5	Sawo	1.738	740	495	2.973
6	Sooko	481	184	179	844
7	Pudak	180	79	34	293
8	Pulung	1.401	366	393	2.160
9	Mlarak	712	204	212	1.128
10	Siman	1.730	207	264	2.201
11	Jetis	1.202	358	446	2.006
12	Balong	1.126	360	356	1.842
13	Kauman	1.410	229	337	1.976
14	Jambon	723	289	215	1.227
15	Badegan	690	181	229	1.100
16	Sampung	884	238	207	1.329
17	Sukorejo	1.431	346	445	2.222
18	Ponorogo	2.680	670	755	4.105
19	Babadan	2.624	454	749	3.827
20	Jenangan	1.809	428	450	2.687
21	Ngebel	288	132	23	443
	Total	24.196	7.321	6.870	38.387

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan usaha mikro tahun 2021

Tabel 1.2 menunjukkan perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Ponorogo. Jumlah UMKM di Kabupaten Ponorogo tahun 2021 mencapai 38.387 unit usaha yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Dari tiga kecamatan jumlah UMKM terbanyak yaitu Kecamatan Ponorogo dengan jumlah sebesar 4.105 unit

usaha, selanjutnya disusul Kecamatan Babadan sebesar 3.827 unit usaha dan Kecamatan Sawoo sebesar 2.973 unit usaha. Kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak adalah Kecamatan Ponorogo dengan jumlah sebesar 4.105 unit usaha. Sementara kecamatan jumlah UMKM paling sedikit berada di Kecamatan Pudak dengan jumlah sebesar 293 unit usaha.

Ridwan dan Wawan (2018) menjelaskan bahwa keberadaan UMKM diharapkan dapat mengatasi serta memberikan kontribusi terhadap persoalan-persoalan yang di hadapi saat ini, misal masalah kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendapatan yang diperoleh masih tergolong rendah. UMKM sebagai titik pusat perhatian pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah karena UMKM mempunyai karakteristik tidak berpengaruh terhadap suku bunga dan masih berkembang meskipun dalam keadaan masalah ekonomi. Hal tersebut terlihat adanya kecenderungan jumlah UMKM yang terus meningkat sehingga banyak tenaga pekerja yang diperlukan untuk membantu dalam pengembangan produksi (Lestari, 2020).

Setyawati (2013) menjelaskan bahwa sebuah UMKM harus didukung dengan karakteristik kewirausahaan yang dimiliki pelaku usaha. Sifat kemandirian dan keberanian mengambil resiko menjadi sebuah karakter yang melekat pada diri pelaku UMKM, Karakteristik kewirausahaan dapat menentukan keberhasilan usaha, menjadi seorang wirausahaan memerlukan sebuah kerja keras, keuletan yang tinggi, kreatifitas berfikir yang tinggi, dan mampu berinovasi seiring berjalannya waktu dan mengikuti kondisi yang ada dengan demikian, maka sebuah karakteristik kewirausahaan merupakan sebuah penentu bagi kinerja usaha yang

berkelanjutan. Selain itu pemahaman tentang pertumbuhan usaha sangatlah penting. Pertumbuhan usaha dipengaruhi oleh lingkungan bisnis, sehingga untuk mempertahankannya, bisnis harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Termasuk dalam hal ini pelaku usaha harus merubah atau beradaptasi dengan kondisi agar usaha yang dijalankan dapat tumbuh dan berkembang (Maulana dkk, 2022). UMKM memiliki potensi yang begitu besar namun, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) didalam perkembangannya masih dihadapkan pada berbagai masalah, misalnya permodalan, tenaga kerja dan catatan keuangan yang dapat mempengaruhi nilai pendapatan dari setiap UMKM.

Tabel 1.3 Data Rata-Rata Pendapatan UMK Kecamatan di Ponorogo

Keterangan	Kecamatan		
	Sawoo	Babadan	Ponorogo
Presentase Penduduk	6,38 %	7,32%	8,70%
Jumlah UMKM	2973	3.827	4105
Jumlah Pendapatan	Rp 7.368.290.000	Rp 13.539.830.000	Rp 9.209.386.000
Rata-Rata	Rp 2.478.402	Rp 3.537.974	Rp 2.243.455

Sumber : *Data diolah tahun 2022*

Tabel 1.3 merupakan tabel mengenai jumlah Pendapatan dan Rata-rata dari tiga kecamatan dengan jumlah UMKM terbanyak di Ponorogo. Dari ketiga wilayah tersebut diketahui bahwa jumlah UMKM tertinggi di Kecamatan Ponorogo sebesar 4.105 unit usaha dengan pendapatan yang diperoleh Rp 9.209.386.000 dengan rata-rata Rp 2.243.455 jumlah presentase penduduk 8,70%, diposisi kedua Kecamatan Babadan total UMKM 3.827 unit usaha dengan Pendapatan senilai Rp 13.539.830.000 dengan rata-rata Rp 3.537.974 jumlah presentase penduduk 7,32% dan diurutan ketiga Kecamatan Sawoo UMKM diangka 2.973 unit usaha dengan Pendapaan

sejumlah Rp 7.368.290.000 dengan rata-rata Rp 2.478.402 jumlah presentase penduduk 6,38%. Dari data tersebut selisih rata-rata pendapatan UMKM Kecamatan ponorogo dengan Kecamatan Babadan Rp. 1.294.519 dan Rp. 234.947 pada Kecamatan Sawoo. Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa Kecamatan Ponorogo memiliki jumlah UMKM terbanyak dengan jumlah presentase penduduk terbesar namun, menurut perhitungan rata-rata Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo tergolong lebih rendah dari dua kecamatan lain, sehingga dapat di simpulkan jumlah UMKM dan jumlah penduduk dikecamatan ponorogo tergolong banyak, namun hal ini tidak diimbangi dengan jumlah pendapatannya, dimana jumlah pendapatan UMKM di kecamatan ponorogo masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini yang mendasari peneliti kuntut melakukan penelitian di Kecamatan Ponorogo.

UMKM keberadaannya sangat bermanfaat dan mendistribusikan pendapatan Selain itu, mengingat daerah/kota di Indonesia memiliki jumlah penduduk yang besar, UMKM juga dapat menyerap tenaga kerja secara besar-besaran hingga 96,9 persen dari total penyerapan tenaga kerja nasional, yang dapat menurunkan angka pengangguran. Selama ini UMKM terbukti mampu menjadi penopang di masa krisis, dengan mekanisme dan peluang kerja serta memiliki nilai tambah (Putri, 2020). Pemberdayaan UMKM menjadi sangat strategis karena mempunyai potensi yang besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan (Amalia, 2018). Pendapatan merupakan salah satu faktor yang dapat mengukur tingkat keberhasilan suatu usaha, semakin banyak jumlah

pendapatan yang diterima semakin banyak keuntungan yang diperoleh (Rahma, 2021).

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM dalam meningkatkan Pendapatan usaha yaitu dari segi permodalan (Rahma, 2021). Modal merupakan faktor yang mempunyai peran cukup penting dalam proses produksi, karena modal diperlukan ketika pelaku usaha hendak mendirikan usaha baru atau untuk memperluas usaha, tanpa modal yang cukup maka akan berpengaruh terhadap kelancaran usaha sehingga akan memengaruhi pendapatan yang diperoleh (Dewi dan Utari, 2014). Sumber modal merupakan darimana asal uang atau barang tersebut diperoleh sebagai awal untuk mendirikan suatu usaha. Sumber modal dibedakan menjadi dua, yaitu modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri merupakan dana yang berasal dari pemilik usaha, sedangkan modal pinjaman merupakan sumber dana yang berasal dari luar seperti pinjam kepada bank, lembaga keuangan, koperasi dll (Nursafitri, 2021). Menurut Kasmir (2006) Sulitnya mengakses sumber pembiayaan menjadikan pemilik UMKM cenderung menggunakan modal sendiri yang terbatas untuk menjalankan usahanya dari pada mengajukan pinjaman ke bank atau lembaga keuangan lainnya, padahal pinjaman atau utang yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya dapat memotivasi pemilik untuk memajukan usaha, ini adanya beban bagi pemilik usaha untuk mengembalikan pinjaman.

Modal sendiri merupakan Faktor pertama yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM, Penggunaan modal sendiri bagi pelaku UMKM

mempunyai peran cukup penting untuk pembuatan produksi. Hal ini karena modal diperlukan ketika pengusaha hendak mendirikan usaha baru atau untuk meluaskan usaha yang ada. Tanpa adanya modal yang mencukupi maka akan mempunyai pengaruh untuk kelancaran usaha, sehingga dapat berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh (Lestri, 2020). Ridwan dan Wawan (2018) menjelaskan bahwa Penggunaan modal sendiri sangat jauh dari resiko kerugian hal ini perusahaan tidak dibebankan dengan sejumlah utang yang menjadi tanggungjawab perusahaan untuk membayar. Berdasarkan penelitian (Putri, 2020) menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya modal sendiri berpengaruh terhadap pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Semakin besar modal sendiri yang digunakan untuk keperluan proses produksi, maka barang yang diproduksi akan semakin meningkat sehingga pendapatan yang diperoleh akan semakin meningkat (Marfuah dan Hartiyah, 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Lestari (2020) menyatakan bahwa Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan UMKM. Hal ini didukung oleh penelitian Marfuah dan Hartiyah (2019) yang menyatakan bahwa Modal Sendiri berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Sedangkan penelitian Rinjaya T. (2020) menunjukan bahwa Modal Sendiri tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Selain modal sendiri faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM yaitu permasalahan dalam memperoleh kredit dari lembaga keuangan perbankan. Pemerintah meluncurkan kredit untuk UMKM dengan fasilitas penjaminan menggunakan nama Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Faktor kedua yang mempengaruhi pendapatan UMKM merupakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Daerah (Ridwan dan Wawan 2018). Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat diartikan sebagai sumber modal bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dapat dimanfaatkan untuk pengadaan fasilitas usaha yang akan digunakan sebagai produksi (Rahma, 2021). Nabiilah (2021) menjelaskan Kredit Usaha Rakyat (KUR) digunakan untuk membantu meningkatkan jalannya usaha melalui pembiayaan. Modal merupakan sarana pendukung dalam kelangsungan suatu usaha. Oleh karena itu, pemerintah ikut serta membantu melalui pemberian kredit usaha rakyat (KUR). Menurut Ridwan dan Wawan (2018) menyatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sangat berperan penting dalam meningkatkan kinerja pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hal ini dapat dibuktikan dari adanya perubahan biaya produksi, omset penjualan, serta keuntungan yang semakin meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Marfiah dan Hartiyah, 2019) menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh positif terhadap pendapatan usaha. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan (Ridwan dan Wawan, 2018) yang menyatakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan terhadap pendapatan. Namun, Berbeda dengan penelitian (Royanti 2021) yang menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat tidak berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan UMKM yaitu pengetahuan akuntansi. Melalui penelitian yang dilakukan (Tambunan, 2019) menyatakan bahwa lama seorang pelaku usaha menekuni usaha maka akan

meningkat pula pengetahuan dan akan berpengaruh pada tingkat pendapatan. Dengan kata lain, semakin lama seorang pelaku bisnis menjalankan usaha maka akan semakin meningkat pula pengetahuan akuntansinya.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi pendapatan adalah Pengetahuan Akuntansi (Fatmawati, 2021). Fatmawati (2021) mendeskripsikan Pengetahuan Akuntansi sebagai suatu persepsi jelas akan apa yang dipandang sebagai fakta, kebenaran atau informasi mengenai proses pencatatan, pengelompokan, dan pengikhtisaran kejadian-kejadian economic dalam bentuk yang teratur dan logis dengan tujuan menyajikan informasi keuangan yang dibutuhkan untuk mengambil kebijakan. (Sembiring dan Suwetja, 2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam memanfaatkan pinjaman KUR, penerapan akuntansi sangat diperlukan. Dengan menerapkan akuntansi dalam pengelolaan usaha dapat membangun kepercayaan pihak bank dalam memberikan pinjaman modal KUR (Kredit Usaha Rakyat) terhadap pelaku UMKM sehingga pihak bank dapat melihat kelayakan dari proses yang sedang dijalankan dan dapat mengawasi perkembangan KUR yang telah dimanfaatkan oleh UMKM. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan akuntansi, dibuktikan dengan banyaknya pelaku UMKM belum melakukan pencatatan atas laporan keuangan yang baik. Kebanyakan UMKM hanya mencatat jumlah uang yang diterima dan dikeluarkan, jumlah barang yang dibeli dan dijual, serta jumlah piutang/utang (Tambunan, 2019).

Pengetahuan terhadap akuntansi dapat membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pencatatan dengan benar, mengukur tingkat pendapatan dan pengeluaran dari usaha yang dijalankan, sehingga para pelaku UMKM

dapat mengetahui keuntungan usaha dengan tepat, serta pengelolaan dan akuntabilitas dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Dari pengetahuan akuntansi pelaku usaha dapat mengetahui besarnya modal yang dimiliki serta dapat mengetahui perkembangan usaha (Tambunan, 2019).

Hasil penelitian (Fatmawati, 2021) menyatakan bahwa Pengetahuan Akuntansi berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM. Berbeda dengan penelitian (Afrianti dan Halim, 2021) yang menyatakan bahwa Pengetahuan Akuntansi tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM. Selain Pengetahuan Akuntansi faktor lain yang dapat mempengaruhi pendapatan yaitu Tenaga kerja. Sebagaimana diketahui bahwa dalam teori faktor produksi jumlah output/produksi yang berhubungan dengan pendapatan bergantung pada jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja disini berbeda-beda, dengan bertambahnya tenaga kerja maka pendapatan UMKM meningkat (Artini, 2019)

Faktor keempat yang mempengaruhi pendapatan adalah Tenaga Kerja (Lestari, 2020) . Jumlah tenaga kerja dengan kualitas yang baik akan meningkatkan produktivitas sehingga akan memberikan keuntungan bagi perusahaan karena produksi akan meningkat seiring dengan meningkatnya produktivitas pekerja dan pendapatan yang dihasilkanpun juga akan ikut meningkat (Lestari, 2020). Laili dan Setiawan (2019) menjelaskan bahwa Tenaga kerja dapat membantu dalam proses produksi maupun melayani konsumen sehingga permintaan konsumen dapat terpenuhi. Jika permintaan konsumen dapat terpenuhi maka pendapatan juga akan meningkat. Hal ini menunjukan bahwa hubungan antara tenaga kerja dengan pendapatan bersifat

positif ,artinya semakin bertambahnya tenaga kerja akan meningkatkan produktivitas sehingga meningkatkan pendapatan UMKM.

Penelitian yang dilakukan (Prahastiwi Dinda W.R dkk, 2021) menunjukkan bahwa tenaga kerja berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Hal serupa juga ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan (Laili dan Setiawan, 2020) yang menyatakan bahwa Tenaga Kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan UMKM. Namun, hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan (Polandos dkk, 2019) yang menyatakan bahwa Tenaga Kerja tidak berpengaruh terhadap pendapatan UMKM.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu dengan melakukan kompilasi variabel penelitian (Fatmawati, 2021) yaitu Variabel Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan Pengetahuan Akuntansi dan penelitian (Lestari, 2020) yaitu Variabel Modal Sendiri dengan Tenaga Kerja. Maka judul yang peneliti ambil adalah **“PENGARUH MODAL SENDIRI, KREDIT USAHA RAKYAT (KUR), PENGETAHUAN AKUNTANSI DAN TENAGA KERJA TERHADAP PENDAPATAN UMKM DI KECAMATAN PONOROGO”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apakah pengaruh Modal Sendiri terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo ?
- b. Apakah pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo ?

- c. Apakah pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo ?
- d. Apakah pengaruh Pengetahuan Akuntansi terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo ?
- e. Apakah pengaruh Modal sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pengetahuan Akuntansi dan Tenaga Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui pengaruh Modal Sendiri terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Tenaga Kerja terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo.
- d. Untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan Akuntansi terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo.
- e. Untuk mengetahui pengaruh Modal sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pengetahuan Akuntansi dan Tenaga Kerja secara bersama sama berpengaruh terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini yaitu :

a. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Harapan dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan referensi baru bagi Mahasiswa terutama di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo

b. Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo

Harapan dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pelaku UMKM di Kecamatan Ponorogo untuk meningkatkan kualitas dan kinerja agar tercapai pendapatan yang maksimal dalam usaha.

c. Bagi Peneliti

Harapan dari penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dari peneliti mengenai Pengaruh Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR), Tenaga Kerja dan Pengetahuan Akuntansi terhadap Pendapatan UMKM di Kecamatan Ponorogo.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Harapan dari penelitian ini dapat berguna sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.